

Pelajaran dari Aktivisme Digital *KawalCOVID19* dalam Melawan *Infodemic* pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia

Lesson from KawalCOVID19 Digital Activism Against the Infodemic During the COVID-19 Pandemic in Indonesia

Agne Yasa¹, Rahayu²

^{1,2} Magister Ilmu Komunikasi, Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

¹*agne.yasa@mail.ugm.ac.id*, ²*rahayu@ugm.ac.id*

Naskah diterima: 21 November 2022, direvisi: 26 Mei 2023, disetujui: 13 Juli 2023

Abstract

Infodemic and inadequate government public communications have encouraged the birth of digital activism KawalCOVID19 as a source of information about COVID-19. This article aims to identify practices, challenges, and forms of KawalCOVID19 digital activism in fighting the infodemic in Indonesia. This study uses the concept of infodemic, digital activism, and New Social Movement theory with a single case study qualitative method. This study found that KawalCOVID19 fights the infodemic with strategies for collecting, verifying, and analyzing COVID-19 data at the regional and central levels; providing informational, educational, and verification content about COVID-19; disseminating information on the website and social media to the public, and advocating government policy; and collaborating to extend the reach. KawalCOVID19 faces challenges from technological, interactional, personal, and policy perspectives. KawalCOVID19 is a form of data activism in the category of digital gladiatorial activities. Furthermore, digital activism continues to grow and presents opportunities for theoretical and empirical studies with different contexts and different activism actors and also analysis of the reception of activism.

Keywords: *civil society, digital activism, hoax, infodemic, COVID-19 pandemic*

Abstrak

Infodemic dan komunikasi publik pemerintah yang belum memadai mendorong lahirnya aktivisme digital seperti KawalCOVID19 sebagai sumber informasi tentang COVID-19. Artikel ini bertujuan mengidentifikasi praktik, tantangan, dan bentuk aktivisme digital KawalCOVID19 dalam melawan infodemic di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep infodemic, aktivisme digital, dan teori New Social Movement dengan metode kualitatif studi kasus tunggal. Hasil penelitian menemukan bahwa KawalCOVID19 melawan infodemic dengan strategi pengumpulan, verifikasi, dan analisis data COVID-19 di daerah dan pusat; konten informasi, edukasi, dan verifikasi tentang COVID-19; diseminasi informasi di website dan media sosial kepada masyarakat serta mengadvokasi kebijakan pemerintah; dan kolaborasi untuk memperluas jangkauan. KawalCOVID19 menghadapi tantangan dari sisi teknologi, interaksional, personal, dan kebijakan. KawalCOVID19 merupakan bentuk data activism dalam kategori digital gladiatorial activities. Aktivisme digital dalam melawan hoaks terus berkembang dan membuka peluang untuk kajian secara teori dan empiris dengan konteks dan aktor yang berbeda serta analisis resepsi dari aktivisme.

Kata kunci: *aktivisme digital, hoaks, infodemic, komunitas, pandemi COVID-19*

PENDAHULUAN

Persoalan *infodemic* berkembang saat pandemi COVID-19 yang mendorong munculnya aktivisme digital dalam melawan *infodemic*. Sebagaimana dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) bahwa wabah dan respons COVID-19 disertai dengan *infodemic* yang masif (Zarocostas 2020). *Infodemic* dapat dimaknai sebagai informasi yang berlebihan, baik benar maupun salah yang mempersulit orang untuk menemukan sumber yang dapat dipercaya dan memperoleh panduan valid ketika diperlukan untuk pengambilan keputusan (Zarocostas 2020).

Di Indonesia, krisis kesehatan akibat COVID-19 juga disertai persoalan *infodemic*. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menurunkan (*take-down*) 1.725 hoaks dari 1.984 konten hoaks yang berkaitan dengan COVID-19 di platform media sosial selama kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 23 September 2020 (Kementerian Komunikasi dan Informatika 2020). Sementara itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) mencatat terdapat total 788 hoaks COVID-19 selama tahun 2020 (Hidayah dkk. 2021).

Situasi *infodemic* yang terjadi di Indonesia diperparah oleh komunikasi publik pemerintah yang bermasalah (Winanti dan Mas'udi 2020). Hal tersebut seperti menganggap remeh tingkat urgensi maupun dampak, terutama di awal ketika wabah ini muncul, serta pernyataan para pejabat tinggi negara yang tidak selaras sehingga memunculkan kebingungan di masyarakat (Winanti dan Mas'udi 2020; Farisa dan Galih 2020).

Munculnya banyak informasi hoaks merupakan implikasi dari ketidakterbukaan pemerintah atas data persebaran yang ikut menyebabkan kepanikan dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat (Monggilo 2020a). Terdapat tiga permasalahan utama dalam buruknya sistem informasi pemerintah selama pandemi yaitu inkonsistensi informasi, minimnya transparansi data, dan data yang tidak tersinkronisasi dengan baik (Farizi dan Harmawan 2020).

Persoalan kesimpangsiuran informasi juga berupaya dijawab oleh berbagai media warga (Lavenia 2021). *Remotivi* mencatat *LaporCovid-19*, *KawalCOVID19*, dan *Pandemic Talks* adalah tiga media warga yang secara konsisten menjadi kanal penyedia informasi sejak awal pandemi tahun 2020. Ketiganya memiliki misi serupa, yaitu mengatasi kesenjangan informasi dan memberikan materi edukasi. Dalam perkembangannya, situs *Urun Daya COVID-19* dan *Warga Bantu Warga* turut diluncurkan untuk membantu pengarsipan informasi mengenai layanan kesehatan (Lavenia 2021).

KawalCOVID19 hadir sejak 1 Maret 2020 dengan memanfaatkan media digital dalam aktivitasnya melalui *website kawalCovid19.id* beserta akun-akun media sosialnya yaitu *@KawalCOVID19.id* di *Instagram*, *@KawalCOVID19* di *Twitter* dan *Facebook* yang dimutakhirkan secara berkala. Informasi dalam platform tersebut dimutakhirkan berkala dengan esensi isi informasi, verifikasi, dan edukasi (KawalCOVID19.id. 2020).

KawalCOVID19 menjadi salah satu bentuk aktivisme oleh warga yang paham teknologi dengan menciptakan platform online *urun daya* atau *crowdsourcing* (Youngs dkk. 2021). Selain itu, melibatkan relawan dengan jumlah yang besar dan tersebar di dalam dan luar negeri, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi *KawalCOVID19*. Relawan *KawalCOVID19* terdiri dari aktivis data yang sebagian berlatar belakang medis, edukasi, sains, riset, teknologi, dan komunikasi massa (KawalCOVID19.id. 2020). Dalam beberapa kesempatan, *KawalCOVID19* sangat lantang untuk mengkritik dan mendorong kebijakan yang lebih baik dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian, pada November 2021, *KawalCOVID19* mengumumkan berhenti melakukan

pembaruan data karena menilai situasi Indonesia membaik dan mulai terkendali (*KawalCOVID19* 2021). Komunitas *Kawal* konsisten melakukan aktivisme digital, pertama kali adalah ketika Pemilu 2014 dengan *KawalPemilu* yang muncul dalam konteks situasi politik. *KawalPemilu* menjadi kisah sukses *crowdsourcing* politik *cyber* di Indonesia karena menerima banyak dukungan dari pengguna internet (Lee 2018). Kemudian, pada 2020, *KawalCOVID19* lahir dalam konteks pandemi COVID-19.

Riset mengenai aktivisme digital yang dilakukan warga lewat *KawalCOVID19* dalam melawan *infodemic* ini menjadi penting karena sebagai fenomena empiris yang dapat menggambarkan perkembangan aktivisme digital di Indonesia pada masa pandemi COVID-19.

Penelitian tentang aktivisme digital dalam konteks pandemi COVID-19 juga pernah dilakukan. Praktik aktivisme data di Brazil dengan kasus *Brasil.IO* yaitu aktivisme oleh relawan di Brazil yang mencoba mengatasi *infodemic* (Füßy 2021). Kemudian, gerakan kampanye komunitas *Japelidi* lawan COVID-19 yang dilakukan oleh aktivis melalui aktivitas di media sosial *Twitter* dan *Instagram Japelidi* (Annisa, Adikara, dan Poerwaningtias 2020). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian *KawalCOVID19* ini lebih kompleks dalam aktivisme digital yang dilakukan. Selain itu, latar belakang aktivis yang terlibat juga berbeda. Kemudian, dari konteks politik terdapat perbedaan antara pemerintah Indonesia dan Brazil dalam kebijakan informasi pandemi COVID-19.

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi gap penelitian mengenai aktivisme digital dalam konteks pandemi di Indonesia serta penelitian tentang upaya melawan hoaks atau *infodemic* dengan aktivisme menggunakan media digital dari perspektif ilmu komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivisme digital dalam melawan persoalan *infodemic* saat pandemi COVID-19 di Indonesia yang dilakukan oleh komunitas *KawalCOVID19* dengan menyediakan informasi melalui media berbasis urun daya (*crowdsourcing information centre*) yaitu *website* dan media sosial.

Penelitian ini menggunakan konsep *infodemic*, aktivisme digital, dan teori *New Social Movement* untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan kolektif dari *KawalCOVID19*.

Infodemic dapat dikategorikan sebagai *information disorder*. Luapan informasi digital memiliki konsekuensi pada peningkatan jumlah dan sebaran hoaks yang berimplikasi pada terganggunya tatanan iklim informasi pada masa pandemi (Monggilo 2020b). *First Draft* menyatakan kekacauan informasi terdiri dari dua kategori, yaitu informasi yang salah dan informasi yang diniatkan untuk merugikan pihak tertentu. Turunannya dibagi ke dalam tiga tipe informasi yaitu misinformasi yang tergolong ke dalam informasi salah, disinformasi yang berada di antara irisan informasi yang salah dan bermaksud merugikan, serta mal-informasi sebagai informasi yang merugikan (Wardle dan Derakhshan 2017; Wardle 2019; Monggilo 2020b; Wardle dan Derakhshan 2018).

Salah satu tema dari aktivisme digital di Indonesia adalah *counter-hoaxivism* yaitu upaya melawan hoaks yang diprakarsai berbagai pihak (Paskarina 2020). George dan Leidner (2019) menyatakan aktivisme digital sebagai aktivisme sosial yang dimediasi melalui teknologi digital untuk mempromosikan gerakan sosial. George dan Leidner (2019) memberikan 10 contoh representatif kegiatan aktivisme digital (*digital activism*) dan mengkategorikannya sebagai *digital spectator activities*, *digital transitional activities*, dan *digital gladiatorial activities* yang meliputi *clicktivism*, *metavoicing*, *assertion (digital spectator activities)*; *political consumerism*, *digital petitions*, *botivism*, dan *e-funding (digital transitional activities)*; serta *data activism*, *exposure*, dan *hacktivism (digital gladiatorial activities)*.

Kemudian, konsep aktivisme data (*data activism*) yaitu bentuk-bentuk baru keterlibatan

sipil dan aksi politik yang timbul dari kesadaran warga negara akan peran penting informasi sebagai jalinan baru kehidupan sosial (Milan dan van der Velden 2016). Aktivisme data merupakan salah satu bentuk dari aktivisme digital. Untuk memahami fenomena ini, peneliti menggunakan teori Gerakan Sosial Baru (*New Social Movement*) untuk menganalisis dimensi aksi kolektif dari aktivisme data dari *KawalCOVID19*. Paradigma Gerakan Sosial Baru secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang dapat dilihat dari empat aspek, yaitu, *ideology* dan *goals; tactics; structure*; dan *participants of contemporary movements* (Pichardo 1997). Hal ini termasuk analisis pada upaya mengisi gap informasi dan mengadvokasi kebijakan dengan memanfaatkan *website* dan media sosial untuk mendorong kebijakan penanganan pandemi yang lebih memadai.

Kondisi yang berkaitan dengan COVID-19 juga terus berkembang dan dapat menimbulkan ketidakpastian dari perubahan situasi sehingga aktivisme digital *KawalCOVID19* dapat menjadi pembelajaran (*lesson learned*) sebagai salah satu model aktivisme untuk konteks serupa seperti pandemi atau situasi krisis kesehatan lain di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif. Peneliti berupaya melihat fenomena komunikasi dari munculnya keterlibatan komunitas relawan *KawalCOVID19* untuk melawan *infodemic* saat pandemi COVID-19.

Peneliti mengutamakan tiga hal dalam mencari dan mengumpulkan data yaitu wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumen. Ketiga hal ini paling relevan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data tentang inisiatif *KawalCOVID19* secara menyeluruh dari para relawan yang terlibat. Total terdapat 10 informan dengan komposisi tujuh orang relawan dari *KawalCOVID19* dan tiga orang merupakan mitra yang pernah bekerja sama dengan *KawalCOVID19*. Wawancara dilakukan pada periode Mei-Juli 2022 secara virtual melalui aplikasi *Zoom*. Selain itu, wawancara tahap awal pernah dilakukan dengan salah satu informan yaitu inisiator *KawalCOVID19* Ainun Najib pada 25 Juli 2021.

Tabel 1 Daftar Informan

Nama Informan	Posisi	Tanggal wawancara
Ainun Najib	Inisiator <i>KawalCOVID19</i>	20 Mei 2022 25 Juli 2021
Elina Ciptadi	Co-founder <i>KawalCOVID19</i>	24 dan 26 Mei 2022
Grace Suryani	Koordinator Tim Konten <i>KawalCOVID19</i>	1 Juni 2022
Zain Fathoni	Koordinator Tim Teknologi <i>KawalCOVID19</i>	4 Juni 2022
Dewindra Widiamurti	Relawan dokter, praktisi kesehatan, dan Admin Tim Media Sosial <i>KawalCOVID19</i>	7 Juni 2022
Informan 6 (tidak bersedia disebutkan identitasnya)	Tim inti, <i>Co-founder</i> , dan Koordinator Tim Media Sosial <i>KawalCOVID19</i>	10 Juni 2022
Ronald Bessie	Koordinator Tim Data <i>KawalCOVID19</i>	14 Juni 2022
Pepita Holy Gunawan	Founder REFO (PT. Reformasi Generasi Indonesia)	24 Juni 2022
Juno Simorangkir	Founder Covid Survivor Indonesia	26 Juni 2022
Giovanni Fadhillah van Empel	Dokter dari Universitas Gadjah Mada	1 Juli 2022

Sumber: Diolah peneliti 2022

Kemudian, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan pada *website KawalCOVID19* dan media sosial *KawalCOVID19*. Studi pustaka dan dokumen dilakukan untuk mencari referensi yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti menelusuri jejak digital dari aktivitas *KawalCOVID19* dalam bentuk dokumen, artikel pemberitaan, dan video di *Youtube* maupun situs lain. Setelah itu dilakukan cek silang data dan analisis terkait aktivisme digital *KawalCOVID19*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktivisme Digital dan Tantangan *KawalCOVID19*

KawalCOVID19 melawan *infodemic* melalui aktivisme digital yang termasuk dalam *counter-hoaxivism* yaitu strategi melawan hoaks dari berbagai sisi (Paskarina 2020). *KawalCOVID19* melakukan beberapa strategi dalam melawan *infodemic* yaitu pengumpulan, verifikasi, dan analisis data COVID-19 di daerah dan pusat; konten informasi, edukasi, dan verifikasi tentang COVID-19; diseminasi informasi dengan menggunakan *website* dan media sosial serta advokasi kebijakan; dan kolaborasi.

Pengumpulan data kasus COVID-19 dari daerah kabupaten/kota adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh tim data *KawalCOVID19* (Najib 2022). Pengumpulan data kasus COVID-19 dilakukan setiap hari untuk menghimpun data seperti kasus positif dan data kematian yang berasal dari pemerintah daerah (Bessie 2022). Pengumpulan data dilakukan secara daring oleh relawan dengan mengikuti jadwal publikasi dari masing-masing pemerintah daerah. Data yang terkumpul kemudian disatukan dan dibuat pencatatannya pada platform *Google Sheet* oleh relawan. Hasil pencatatan data COVID-19 ini dapat diakses publik di kcv.id/datakabupaten (Bessie 2022).

Data Provis		Date	8/17/2022	8/18	8/17	8/16	8/15	8/14	8/13	8/12	8/11	8/10	8/9	8/8	8/7		
No	Provinsi Asal	% kenaikan dalam 1 bulan	Selisih Harian	Covid19 Total													
1	0	1	Aceh	114,7%	40	37.792	37.734	37.594	37.532	37.590	37.437	37.483	37.395	37.310	37.240	37.118	36.954
2	0	2	Bali	101,14%	5	113.883	113.887	113.882	113.872	113.868	113.835	113.821	113.800	113.777	113.744	113.715	113.682
3	0	3	Banten	100,62%	11	133.948	133.930	133.909	133.912	133.905	133.904	133.864	133.857	133.839	133.824	133.719	133.707
4	0	4	Bangka Belitung	109,53%	59	51.209	51.147	51.058	51.027	50.995	50.940	50.881	50.830	50.740	50.650	50.470	50.491
5	0	5	Bengkulu	102,45%	2	23.930	23.924	23.922	23.921	23.921	23.913	23.907	22.993	22.983	22.975	22.971	22.959
6	0	6	DI Yogyakarta	102,54%	70	166.764	166.739	166.669	166.631	166.658	166.601	166.412	166.340	166.292	166.233	166.135	166.050
7	0	7	DKI Jakarta	100,42%	77	861.832	861.700	861.523	861.540	861.427	861.331	861.235	861.104	860.999	860.982	860.880	860.749
8	0	8	Jambi	105,14%	45	29.601	29.586	29.547	29.529	29.510	29.479	29.468	29.435	29.407	29.455	29.421	29.335
9	0	9	Jawa Barat	101,57%	37	708.494	708.295	708.218	708.050	707.995	707.447	707.409	707.385	707.157	709.402	709.189	709.052
10	0	10	Jawa Tengah	100,96%	60	632.794	632.590	632.532	632.423	632.310	632.202	632.099	631.998	631.858	631.828	631.310	631.118
11	0	11	Jawa Timur	103,23%	100	395.555	395.431	395.235	395.011	394.832	394.740	394.570	394.355	394.135	393.915	393.021	393.305
12	0	12	Kalimantan Barat	104,95%	7	61.211	61.130	61.123	61.057	61.054	61.054	60.968	60.934	60.854	60.727	60.654	60.648
13	0	13	Kalimantan Timur	104,10%	60	158.877	158.822	158.782	158.859	158.892	158.818	158.442	158.364	158.223	158.093	158.053	158.781
14	0	14	Kalimantan Tengah	104,41%	21	48.240	48.220	48.199	48.158	48.122	48.095	48.051	48.020	48.078	48.033	48.090	48.045
15	0	15	Kalimantan Selatan	107,18%	25	89.318	89.295	89.259	89.321	89.159	89.075	89.023	88.951	88.901	88.886	88.854	88.841
16	0	16	Kalimantan Utara	108,88%	53	35.842	35.814	34.953	34.917	34.851	34.814	34.751	34.693	34.540	34.574	34.509	34.450
17	0	17	Kepulauan Riau	102,76%	13	53.652	53.632	53.550	53.595	53.590	53.584	53.547	53.547	53.498	53.461	53.417	53.392
18	0	18	Nusa Tenggara Barat	107,35%	21	27.393	27.365	27.344	27.323	27.313	27.297	27.250	27.250	27.131	27.131	27.090	27.036
19	0	19	Sumatera Selatan	102,24%	30	59.269	59.245	59.255	59.266	59.240	59.222	59.203	59.182	59.150	59.121	59.095	59.041
20	0	20	Sumatera Barat	103,24%	23	89.275	89.223	89.200	89.155	89.140	89.110	89.066	88.998	88.911	88.879	88.795	88.785

Gambar 1 Tangkapan layar hasil pengumpulan data kasus COVID-19 oleh tim data *KawalCOVID19* di *Google Sheet* (kcv.id/datakabupaten, 2022)

KawalCOVID19 melakukan verifikasi atau pengecekan akurasi data dengan membandingkan antara satu data dengan data yang lain. Verifikasi data dilakukan di level kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Data kasus COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan data COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Dari hasil pengecekan tersebut, *KawalCOVID19* menemukan perbedaan atau diskrepansi data antara kabupaten/kota ke provinsi, dari provinsi ke nasional, dan kabupaten/kota ke nasional (Bessie 2022).

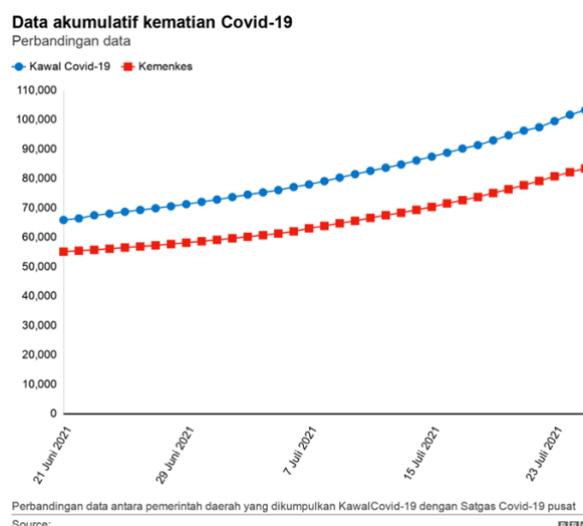
Analisis data dilakukan dengan melihat data yang ada dan faktor penyebabnya saat

ditemukan permasalahan. *KawalCOVID19* menemukan diskrepansi data COVID-19 paling besar adalah data kematian. Setelah analisis ditemukan faktor yang berpengaruh yaitu data kematian yang belum terpusat, data yang belum terintegrasi dengan baik serta standar yang berbeda dalam menentukan kematian akibat COVID-19 (Bessie 2022). Terkait perbedaan data antara pusat dan daerah ini juga diakui oleh pemerintah. Pada awal Desember 2020, Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menyatakan pemerintah berupaya melakukan sinkronisasi data penanganan COVID-19 antara pusat dan daerah (Covid19.go.id. 2020).

Bulan	Oktober			November			Desember			Januari (1-24)		
Rata-rata harian	Pusat	Daerah	Selisih	Pusat	Daerah	Selisih	Pusat	Daerah	Selisih	Pusat	Daerah	Selisih
Kasus	3,970	4,054	-2.06%	4,293	4,714	-8.93%	6,591	7,445	-11.47%	10,698	10,783	-0.78%
Sembuh	3,963	4,057	-2.30%	3,757	4,178	-10.07%	5,180	6,301	-17.80%	8,161	9,089	-10.20%
Meninggal Dunia	101	118	-14.32%	103	149	-30.97%	168	228	-26.42%	248	306	-19.01%

Gambar 2 Tangkapan layar tentang diskrepansi data COVID-19 di Indonesia versi Kementerian Kesehatan RI versus situs pemda tanggal 1-24 Januari 2021. Kasus terkonfirmasi versi pusat di bulan Januari hampir sama dengan versi daerah, tapi jumlah kematian versi pusat lebih kecil 19 persen dari versi daerah (Twitter @KawalCOVID19, 2022)

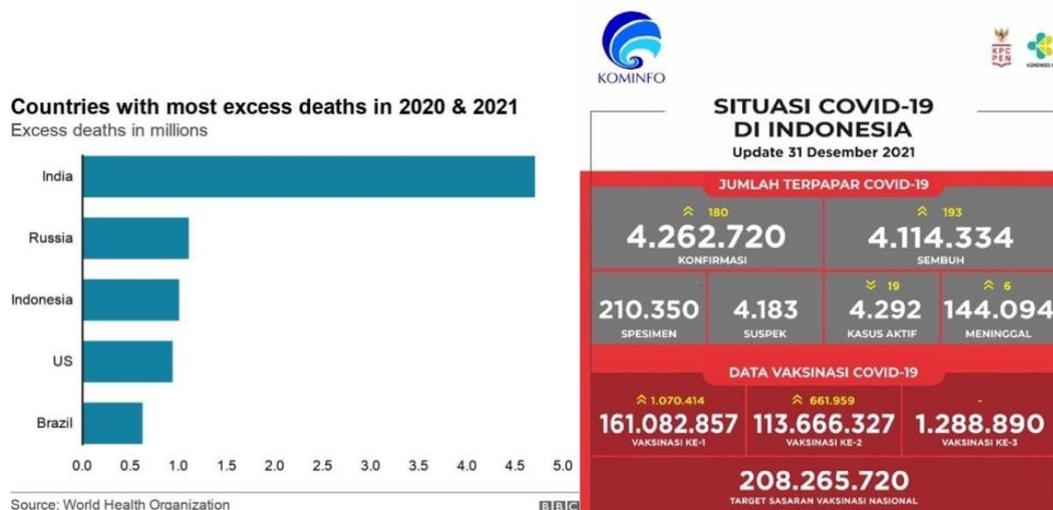
Data secara keseluruhan yang dikumpulkan *KawalCOVID19* juga mengungkapkan bahwa data kematian COVID-19 yang dilaporkan pemerintah pusat lebih sedikit dibandingkan pemerintah daerah. Data kematian terpaut hampir 24 persen atau mencapai 19.857 kasus per 25 Juli 2021 dengan data kematian yang dihimpun *KawalCOVID19* mencapai 103.136, sementara pemerintah pusat 83.279 kasus (BBC News Indonesia 2021).



Gambar 3 Perbandingan data antara pemerintah daerah yang dikumpulkan *KawalCOVID19* dengan Satgas COVID-19 pusat (BBC News Indonesia 2021)

Data WHO juga mengungkapkan bahwa rasio kematian akibat pandemi di Indonesia pada 2020 dan 2021 mencapai 1 juta atau tujuh kali lipat dari angka yang dilaporkan secara resmi (BBC

Indonesia, 2022). Adapun *update* data per 31 Desember 2021 dari pemerintah yang diumumkan di *website* resmi *covid19.go.id* mencatat kasus meninggal karena COVID-19 adalah 144.094 jiwa.



Gambar 4 Data WHO tentang negara dengan *excess death* tertinggi pada 2020 dan 2021 dan situasi COVID-19 di Indonesia per 31 Desember 2021 dari *website* pemerintah (Grimley, Cornish, dan Stylianou 2022; Covid19.go.id. 2021)

Selain itu, dalam aktivitas analisis data, *KawalCOVID19* juga membuat peta risiko atau Indeks Kewaspadaan yang memberikan informasi terkait risiko COVID-19 di suatu daerah. Peta risiko ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan warga setempat dan orang yang akan bepergian ke daerah tersebut (Bessie 2022).

Strategi *KawalCOVID19* berikutnya yaitu melakukan produksi konten untuk melawan informasi yang simpang siur. Konten yang diproduksi mengandung muatan dan tujuan untuk edukasi, verifikasi, dan informasi atau disebut prinsip EVI. Tim *KawalCOVID19* mengimplementasikan prinsip EVI sebagai panduan ketika membuat konten di *website* dan media sosial. Oleh karena itu, setiap konten yang dibuat merupakan bagian dari edukasi, verifikasi, dan informasi. Contohnya, data kasus harian masuk ke dalam bagian informasi dan cara menggunakan masker yang benar masuk ke dalam bagian edukasi (Suryani 2022). Sementara itu, untuk konten verifikasi yaitu submenu *Periksa Fakta* di *website kawalcovid19.id* yang membantah hoaks terkait COVID-19. Untuk verifikasi, *KawalCOVID19* juga bekerja sama dengan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia atau MAFINDO (Najib 2021). Untuk produksi konten oleh tim *KawalCOVID19* melalui beberapa tahapan yaitu ide konten, penulisan, penyuntingan, peninjauan, penyuntingan, dan publikasi.

Dalam melawan *infodemic*, *KawalCOVID19* melakukan diseminasi pesan dengan menggunakan *website kawalcovid19.id* dan media sosial di *Facebook*, *Instagram*, dan *Twitter*. Selain itu, *KawalCOVID19* juga berupaya masuk ke media konvensional seperti televisi, radio, dan media cetak. *KawalCOVID19* juga melakukan advokasi yang merupakan diseminasi dengan sasaran pembuat kebijakan.



Gambar 5 Tangkapan layar website *kawalCOVID19.id* bagian Beranda (*Website kawalCOVID19.id, 2022*)

KawalCOVID19 melakukan diseminasi informasi melalui *website* dan media sosial. Media sosial dipilih karena merupakan medan perang hoaks dan tempat terjadinya perdebatan kebijakan publik. Selain itu, *website* dan media sosial dipilih karena ketersediaan sumber daya tim *KawalCOVID19* (Ciptadi 2022; Najib 2022).

KawalCOVID19 menggunakan pendekatan yang berbeda untuk masing-masing platform karena memiliki audiens dengan demografi dan kebiasaan yang berbeda (Informan 6 2022; Najib 2022). Namun, seringkali satu konten yang sama juga dipublikasikan di semua platform (Ciptadi 2022). Untuk platform *Twitter* lebih sering menggunakan jenis konten utas (*thread*) dengan kata-kata yang kritis dan provokatif karena di situasi mendesak dan untuk mendapatkan respons dari pembuat kebijakan (Informan 6 2022; Najib 2022; Suryani 2022). Kemudian, konten di *Instagram* bersifat visual seperti infografis untuk tujuan edukasi dan *Instagram Live* untuk mengangkat topik-topik penting dengan menghadirkan narasumber yang kompeten (Ciptadi 2022; Informan 6; Suryani 2022). Sementara itu, untuk konten di *Facebook* dapat lebih panjang yang berbentuk infografis, gambar, dan tulisan yang lebih lengkap (Najib 2022).

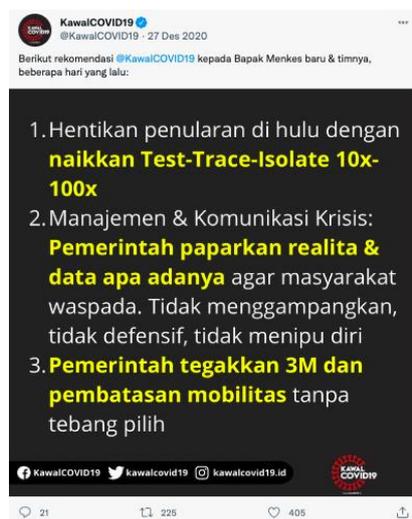
Selanjutnya, *KawalCOVID19* melakukan advokasi yang merupakan upaya diseminasi pesan dengan sasaran kepada pembuat kebijakan seperti pemerintah, institusi, dan organisasi masyarakat. Penyebab upaya advokasi muncul karena melihat respons pemerintah yang tidak serius terutama di awal pandemi COVID-19 (Najib 2021). Tujuan dari advokasi adalah mendorong kebijakan berbasis data (Ciptadi 2022). Salah satu contoh advokasi yang dilakukan pada pemerintah yaitu membuat *brief* dokumen yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo tentang risiko COVID-19 (Informan 6; Najib 2022; Widiyamurti 2022). Namun, tidak langsung mendapatkan respons dari pemerintah sehingga advokasi dilakukan lewat media sosial.

Jadi kalau teman-teman KawalCOVID19 itu keras mengkritik di social media itu karena melalui japri itu sudah [dilakukan] dan tidak [mendapatkan] efek (Najib 2022).



Gambar 6 Tangkapan layar utas (*thread*) di *Twitter* tentang karantina wilayah yang ditujukan untuk pemerintah (*Twitter @KawalCOVID19, 2020*)

Selain itu, *KawalCOVID19* juga pernah memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin terkait penanganan COVID-19 dalam forum temu relawan pada 24 Desember 2020 (detikcom 2020). Rekomendasi tersebut juga dipublikasikan di media sosial *Twitter KawalCOVID19* berikut ini.



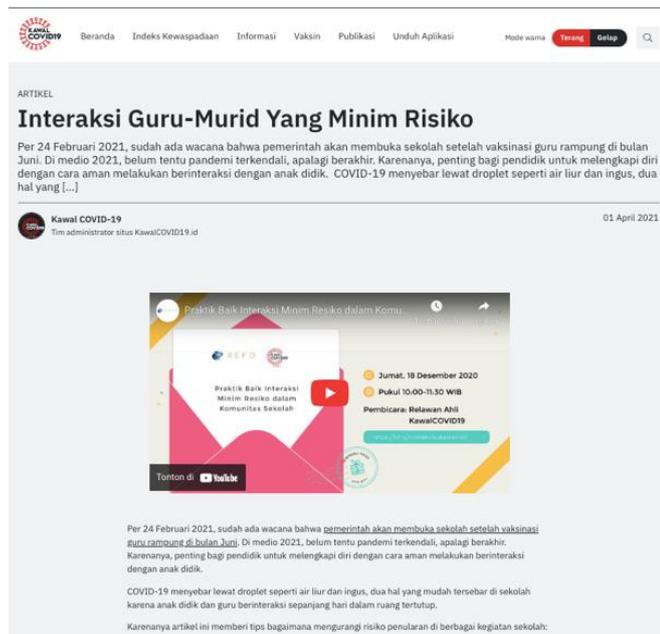
Gambar 7 Twit upaya advokasi *KawalCOVID19* kepada Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin yang baru dilantik pada Desember 2020 (*Twitter @KawalCOVID19, 2022*)

Advokasi juga dilakukan dengan memberikan rekomendasi, menerima laporan di media sosial, dan pendekatan langsung ke komunitas besar (Ciptadi 2022; Informan 6 2022; Widiamurti 2022). Diseminasi juga dilakukan ke media konvensional seperti televisi, media cetak, dan radio

untuk menyebarkan konten tentang COVID-19 (Ciptadi 2022; Widiamurti 2022). *KawalCOVID19* juga mengeluarkan rilis pers, menulis opini di beberapa koran, menyediakan waktu untuk wawancara atau memberikan tanggapan sebagai narasumber terhadap kebijakan atau perkembangan COVID-19 (Ciptadi 2022).

Strategi lainnya, *KawalCOVID19* melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak yaitu individu, institusi, hingga inisiatif digital lain untuk memperkuat dan memperluas jangkauan. Beberapa kolaborasi yang dilakukan yaitu dengan institusi di bidang teknologi pendidikan PT. Reformasi Generasi Indonesia atau *REFO* untuk konten edukasi. Kemudian, komunitas penyintas COVID-19 *Covid Survivor Indonesia* untuk konten artikel testimoni dan sebagai narasumber. Pihak individu seperti dokter Giovanni F. van Empel dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk memberikan informasi dan edukasi. Selain itu, kolaborasi dengan inisiatif digital lain yang melahirkan *Warga Bantu Warga*. Beberapa kolaborator inisiatif *WargaBantuWarga* diantaranya *Kitabisa*, *Indorelawan.org*, *LaporCovid-19*, dan *Narasi* (Najib 2022; *WargaBantuWarga*, 2021).

Para mitra menilai hal paling signifikan dari adanya gerakan *KawalCOVID19* adalah sebagai sumber informasi kredibel mengenai COVID-19 terutama saat awal pandemi COVID-19 (van Empel 2022). *KawalCOVID19* juga menjadi sumber media alternatif (Simorangkir 2022). Kolaborasi yang dilakukan juga dinilai saling menguntungkan karena saling mengisi kebutuhan (Gunawan 2022).



Gambar 8 Tangkapan layar konten kolaborasi *REFO* dan *KawalCOVID19* (*Website kawalcovid19.id*, 2021)

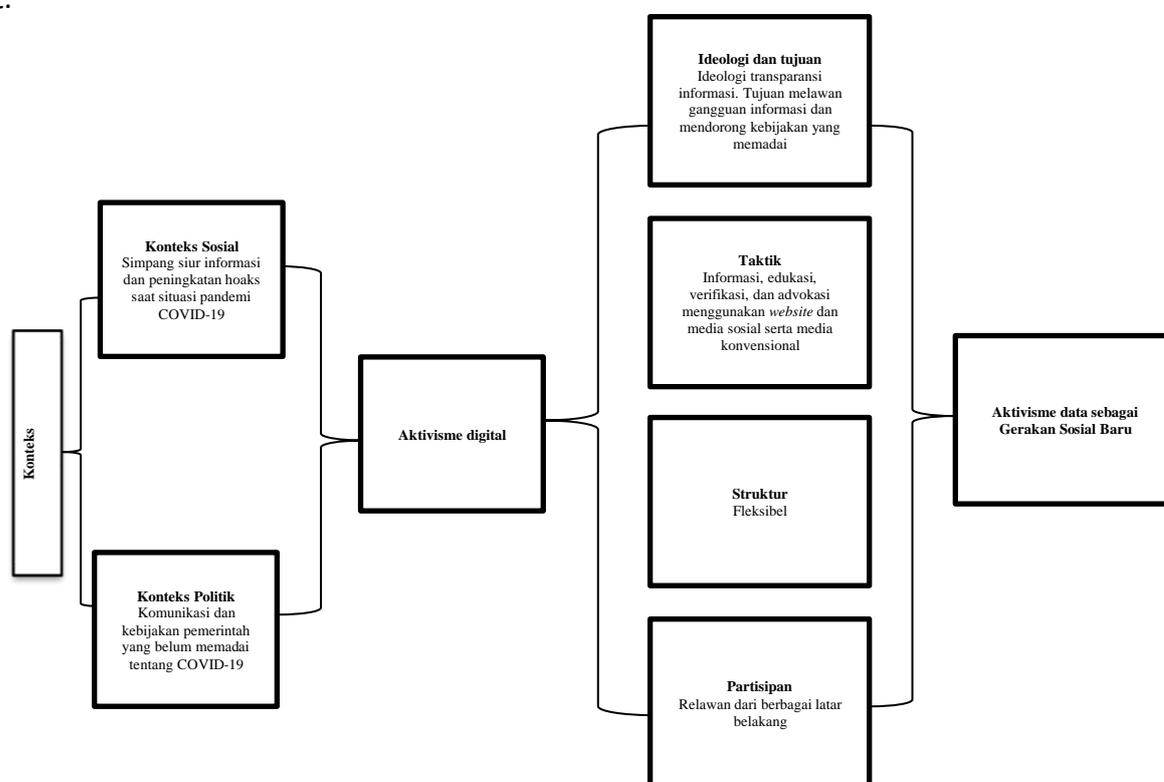
KawalCOVID19 menghadapi tantangan dalam melawan *infodemic* lewat aktivisme digital. Dumitrica dan Felt (2020) merumuskan tiga kategori hambatan aktivisme digital yaitu hambatan teknologi (*technological barriers*), hambatan interaksional (*interactional barriers*) dan hambatan personal (*personal barriers*). Dalam konteks *KawalCOVID19*, peneliti juga menemukan adanya hambatan eksternal berkaitan dengan kebijakan (*policy*) yang dapat menjadi kategori baru yaitu hambatan kebijakan (*policy barriers*).

Hambatan teknologi yang dihadapi *KawalCOVID19* yaitu limitasi dari jangkauan *website* dan media sosial yang terbatas pada lingkup *KawalCOVID19* beroperasi dan pada kalangan yang

fasih teknologi (Najib 2022; Widiamurti 2022). Hambatan interaksional berkaitan dengan pendengung (*buzzer*) politik yang meluncurkan disinformasi serta mengintimidasi secara online serta literasi masyarakat yang masih rendah sehingga sulit untuk menerima edukasi dan tidak mau serius dalam memilah informasi (Ciptadi 2022; Informan 6 2022; Najib 2022; Widiamurti 2022). Hambatan personal yang dihadapi *KawalCOVID19* yaitu kondisi psikologis relawan yang sempat mengalami kondisi stres (Informan 6 2022; Suryani 2022) dan manajemen relawan yang perlu lebih dioptimalkan (Fathoni 2022). Kemudian, hambatan kebijakan berkaitan dengan transparansi data karena tidak semua pemerintah daerah membuka akses data COVID-19 dan belum adanya standarisasi laporan data COVID-19 (Bessie 2022). Selain itu, komunikasi dan kebijakan pemerintah yang belum memadai karena berlawanan dengan data dan sains (Najib 2022; Ciptadi 2022; Widiamurti 2022).

Aktivisme *KawalCOVID19* mengalami dinamika dari awal pendirian sampai pada waktu mengumumkan untuk menghentikan pembaruan (*update*) data atau selama periode 1 Maret 2020 sampai dengan 3 November 2021. Terjadi penyesuaian dari praktik aktivisme *KawalCOVID19* yang mendapatkan pengaruh dari konteks atau situasi yang berkembang saat pandemi COVID-19. Terdapat beberapa periode waktu ketika intensitas aktivitas meningkat yaitu awal krisis pandemi COVID-19 di Indonesia (Maret 2020), akhir tahun 2020 (Desember 2020), dimulainya vaksinasi nasional (Januari 2021), dan gelombang Delta (Juni-Juli 2021). Kemudian, periode ketika intensitas aktivitas menurun yaitu saat hiatus atau menghentikan *update* data (November 2021).

KawalCOVID19 melakukan aktivisme digital dengan memanfaatkan *website* dan media sosial untuk melawan *infodemic* atau simpang siur informasi saat pandemi COVID-19. Peneliti menjelaskan aktivisme digital *KawalCOVID19* dalam bentuk model aktivisme digital sebagai berikut.



Grafik 1 Model aktivisme digital baru dengan aktivisme data dalam melawan hoaks saat pandemi COVID-19 (Hasil riset diolah oleh peneliti, 2022).

Aktivisme digital yang dilakukan dilatarbelakangi konteks sosial dan politik. Konteks sosial yaitu kondisi kesimpangsiuran informasi dan peningkatan hoaks saat situasi pandemi COVID-19. Kemudian, konteks politik yaitu komunikasi dan kebijakan pemerintah yang belum memadai tentang COVID-19. Ideologi yang diusung *KawalCOVID19* adalah transparansi informasi. Tujuannya untuk melawan gangguan informasi dan mendorong kebijakan yang memadai. Aktivisme digital *KawalCOVID19* berkembang menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Taktik atau strateginya adalah memberikan informasi, edukasi, verifikasi pada masyarakat, dan melakukan advokasi pada pembuat kebijakan. Aktivisme digital dilakukan menggunakan *website* dan media sosial yang dimiliki *KawalCOVID19* dan media konvensional. Struktur dalam tim *KawalCOVID19* bersifat fleksibel karena para relawan saling mengisi berdasarkan keahliannya dengan sifat gerakan yang sementara. Kemudian, dari aspek partisipan, tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Partisipan dalam aktivisme digital relawan *KawalCOVID19* ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu tentang pandemi COVID-19.

Aktivisme Data *KawalCOVID19* sebagai Gerakan Sosial Baru

Aktivisme digital *KawalCOVID19* lahir dalam konteks sosial saat pandemi COVID-19 yang disertai *infodemic*. Kemudian, konteks politik di mana komunikasi dan kebijakan pemerintah tentang COVID-19 belum memadai. Dalam upaya melawan *infodemic* dan mendorong perubahan kebijakan penanganan pandemi yang lebih baik diperlukan penggunaan data, fakta, dan sains (Eysenbach 2020). Namun, penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah belum mengoptimalkan penggunaan data, fakta, dan sains sehingga menyebabkan *infodemic* berkembang menjadi permasalahan yang besar.

Rojabaturrohman dkk. menyatakan berbagai pihak dapat melahirkan berbagai gerakan dalam konteks *digital activism* yang mencakup upaya *counter-hoax* (Paskarina 2020). Upaya tersebut seperti gerakan *anti-hoax* dan gerakan literasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar bisa membedakan informasi yang valid dari banyaknya informasi yang beredar (Paskarina 2020). Salah satu aktivisme digital untuk melawan hoaks adalah *KawalCOVID19*. Dibandingkan dengan inisiatif lainnya, *KawalCOVID19* memberikan literasi dengan informasi, edukasi, verifikasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah.

Dalam upaya melawan *infodemic* tersebut, *KawalCOVID19* menggunakan media digital yaitu *website* dan media sosial. Namun, *KawalCOVID19* menyadari bahwa *website* dan media sosial memiliki keterbatasan karena tidak semua memiliki akses sehingga *KawalCOVID19* juga menggunakan media konvensional yang jangkauannya lebih luas seperti media televisi. Hal ini seperti dijelaskan perspektif ekologi media (*media ecology*) yang tidak mengistimewakan media tertentu, melainkan fokus pada praktik komunikasi aktivis. Perspektif ekologi media memungkinkan peneliti untuk menilai potensi partisipatif yang efektif dari setiap media dalam spektrum penuh dari praktik aktivis (Treré dan Kaun 2021). Oleh karena itu, perspektif ekologi media diadopsi untuk mengeksplorasi aktivisme digital dan praktik media dari gerakan sosial baru (Treré dan Kaun 2021).

KawalCOVID19 sebagai sebuah aktivisme digital masuk dalam kategori *digital gladiatorial activities* berdasarkan *hierarchy digital activism* (George dan Leidner 2019). Dalam *digital gladiatorial activities*, aktor tidak berusaha mempengaruhi perubahan melainkan membuat

perubahan. *KawalCOVID19* termasuk dalam kategori *digital gladiatorial activities* yang dapat digambarkan dengan karakteristik jumlah *co-founder* yang sedikit (*low volume of activity*), namun memiliki keahlian di bidang teknologi, data, komunikasi, dan kesehatan (*high resources*) yang berdampak besar pada upaya melawan *infodemic* dan advokasi kebijakan pandemi COVID-19 (*high impact*).

Dalam kategori *digital gladiatorial activities* ini terdapat beberapa jenis aktivitas yaitu *data activism*, *exposure*, dan *hacktivism*. *KawalCOVID19* termasuk dalam aktivitas *data activism* atau aktivisme data. Secara umum, istilah aktivisme data mencakup beberapa aliran aktivitas politik dan aktivisme sosial. Namun, dalam *KawalCOVID19*, bentuk aktivisme data adalah gerakan umum untuk mempromosikan kekuatan individu yang lebih besar atas data yang dimiliki orang lain (George dan Leidner 2019).

Aktivisme data yang dilakukan *KawalCOVID19* merupakan pengumpulan data sebagai tantangan terhadap hak-hak individu dan serangkaian peluang baru untuk perubahan sosial (Milan 2017). *KawalCOVID19* melakukan aktivitas yang mengutamakan data baik itu dari riset tentang COVID-19 maupun pengumpulan data yang dilakukan melawan *KawalCOVID19*. Data tersebut diproduksi menjadi konten dengan muatan informasi, edukasi, dan verifikasi (slogan EVI). Selain itu, data juga menjadi dasar untuk melakukan advokasi kebijakan pemerintah yang dinilai belum memadai.

Dari perspektif aktivisme data, *KawalCOVID19* menunjukkan keterlibatan sipil dalam advokasi mendorong kebijakan penanganan pandemi COVID-19 agar lebih memadai dengan berbasis data atau disebut *proactive data activism* yaitu keterlibatan afirmatif dengan data (Milan dan van der Velden 2016). Aktivisme data dapat dipelajari sebagai bentuk baru partisipasi politik dan keterlibatan sipil di era melimpahnya data atau *datafication* (Milan dan van der Velden 2016).

Partisipasi dalam aktivisme data seringkali terbatas pada mereka yang memiliki ilmu data dan keterampilan analisis (Baack 2015). Dalam kasus *KawalCOVID19*, analisis data kasus COVID-19 yang bersumber dari pemerintah justru bermasalah karena ditemukan adanya diskrepansi antara jumlah kasus positif hingga angka kematian. Akibatnya, ada gap informasi antara yang sesungguhnya terjadi di lapangan dengan pemahaman atas risiko di masyarakat. Aktivisme data yang dilakukan para relawan ini ditindaklanjuti dengan advokasi kebijakan COVID-19.

Aktivisme digital *KawalCOVID19* dalam konteks Gerakan Sosial Baru dapat dilihat sebagai gerakan sosial dari identitas kolektif komunitas *Kawal* yang bertujuan untuk melawan *infodemic* dengan mengedukasi masyarakat dan mengkritik pemerintah. Teori gerakan sosial baru memberikan penekanan khusus pada tindakan simbolik, penentuan nasib sendiri, nilai-nilai postmaterialis, identitas kolektif, artikulasi keluhan (*grievance articulation*), dan organisasi referensi diri mencerminkan ciri-ciri fundamental aktivisme sosial kontemporer dan struktur yang mereka tantang (Buechler 1995).

Sementara itu, paradigma Gerakan Sosial Baru secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang dapat dilihat dari empat aspek, yaitu: ideologi (*ideology*) dan tujuan (*goals*); taktik (*tactics*); struktur (*structure*); dan partisipan dari Gerakan Kontemporer (*participants of contemporary movements*) (Pichardo 1997).

Dalam konteks ideologi dan tujuan, *KawalCOVID19* mengusung ideologi transparansi data. Bagi *KawalCOVID19* data menjadi hal yang penting sebagai basis informasi dan kebijakan. Dari aspek tujuan, *KawalCOVID19* bertujuan untuk melawan gangguan informasi dan mendorong kebijakan yang memadai. Gangguan informasi yang muncul atau *infodemic* berdampak buruk pada penanganan pandemi COVID-19 yang dapat membahayakan jiwa. Oleh karena itu, *KawalCOVID19* berupaya melawan *infodemic* dengan beberapa strategi.

Taktik yang digunakan *KawalCOVID19* adalah memberikan informasi, edukasi, verifikasi pada masyarakat agar dapat mengetahui informasi yang benar dan bersikap sesuai anjuran. Kemudian, *KawalCOVID19* juga melakukan advokasi pada pemerintah untuk kebijakan yang lebih memadai. Sebagai aktivisme digital, gerakan utama dilakukan menggunakan *website* dan media sosial yang dimiliki *KawalCOVID19*. Namun, mempertimbangkan kondisi di Indonesia, *KawalCOVID19* juga menggunakan media konvensional sebagai bagian dari taktik.

Struktur dalam tim *KawalCOVID19* juga bersifat fleksibel menyesuaikan dengan kondisi di mana para relawan saling mengisi berdasarkan keahliannya. Kemudian, *KawalCOVID19* merupakan inisiatif yang bersifat tidak permanen karena telah menyatakan hiatus. Dalam menyikapi isu, *KawalCOVID19* juga mengutamakan diskusi tim dan melibatkan pakar.

Kemudian, dari aspek partisipan dalam gerakan sosial baru, tidak didefinisikan oleh batas kelas tetapi ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu sosial. Relawan *KawalCOVID19* ditandai oleh perhatian umum atas isu-isu tentang pandemi COVID-19 yaitu permasalahan *infodemic* dan kebijakan. Dalam hal ini, *KawalCOVID19* fokus pada aktivisme data dalam upaya melawan *infodemic* termasuk advokasi kebijakan. Hal ini sesuai dengan ideologi *KawalCOVID19* dalam melawan *infodemic* dan advokasi kebijakan yaitu transparansi data. Aktivisme data *KawalCOVID19* ditandai dengan aktivitas pengumpulan dan pemanfaatan data untuk perubahan sosial (Milan 2017). Dalam perspektif Gerakan Sosial Baru, *KawalCOVID19* menandai gerakan kolektif yang mendapatkan pengaruh dari struktur masyarakat era digital melalui aktivisme data.

Melawan *Infodemic* dan Hegemoni Informasi

WHO menyatakan ketidakpastian selama pandemi COVID-19 tidak bisa dihindari, hal ini karena pandemi seperti COVID-19 belum terlihat dalam satu abad dan masih banyak yang belum diketahui dan berkembang tentang situasi dan virus yang menyebabkannya. Ketidakpastian ini menyebabkan ketakutan, kepanikan dan hilangnya kepercayaan diantara orang-orang (World Health Organization Regional Office for South-East Asia 2020).

WHO mengidentifikasi taktik untuk berkomunikasi dan mengelola ketidakpastian secara efektif, terdapat lima arahan untuk mengelola ketidakpastian ketika pandemi COVID-19 yaitu transparansi, mengomunikasikan informasi secara eksplisit tentang ketidakpastian, pertahankan konsistensi dari waktu ke waktu, menjaga konsistensi dalam komunikasi antar mitra, dan mengomunikasikan tindakan (World Health Organization Regional Office for South-East Asia 2020). Dalam kasus Indonesia, pengelolaan ketidakpastian yang dianjurkan WHO ini belum dilakukan secara optimal ketika pandemi COVID-19, terutama di masa-masa awal krisis. Contohnya terkait transparansi, Farizi dan Harmawan (2020) mengungkapkan transparansi informasi virus corona kepada publik masih kurang di Indonesia, misalnya tentang metode dan penelusuran kasus.

Selain itu, WHO menjelaskan perlunya manajemen *infodemic* yang didorong oleh penggunaan informasi berbasis bukti dan berpegang pada prinsip-prinsip keterlibatan masyarakat (World Health Organization 2021). Terdapat empat poin penting yaitu mendengarkan kekhawatiran (*listen to concerns*); mengomunikasikan risiko dan menyaring ilmu pengetahuan (*communicate risk and distill science*); mempromosikan ketahanan terhadap misinformasi (*promote resilience to misinformation*); melibatkan dan memberdayakan masyarakat (*engage and empower communities*) (World Health Organization 2021). Sementara itu, riset *Remotivi* tentang Ekosistem Informasi Pandemi di Jakarta menemukan adanya tiga kesenjangan antara pasokan dan

kebutuhan informasi warga. Kesenjangan-kesenjangan tersebut terjadi di sektor-sektor kebutuhan dasar warga: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (Heychael, Arief, dan Fajar 2021).

Penelitian ini mengeksplorasi aktivisme data *KawalCOVID19* sebagai sebuah gerakan sosial baru. *KawalCOVID19* tidak hanya mendorong dan mengkritisi tindakan pemerintah dalam penanganan COVID-19, tetapi juga melawan *infodemic* sebagai gangguan informasi (misinformasi dan disinformasi) dengan menggunakan data.

Berdasarkan definisi Gerakan Sosial Baru, perjuangan melawan *infodemic* bukan sesuatu yang baru (Buechler 1995; Pichardo 1997; Paskarina 2020). Secara empiris pertarungan melawan misinformasi dan disinformasi dalam situasi krisis berbeda dengan aktivisme digital sebelumnya. Perjuangan tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan masyarakat itu sendiri, tetapi juga terhadap pemerintah yang memiliki hegemoni atas informasi. Dalam beberapa kasus, informasi faktual terkait COVID-19 berusaha diredam dan diremehkan oleh pemerintah dengan maksud menghindari kepanikan. Namun, hal tersebut justru menjerumuskan masyarakat untuk menjadi tidak waspada (Najib 2022; van Empel 2022).

Pandemi COVID-19 menjadi sebuah medan perjuangan baru berbagai gerakan kolektif. Beberapa gerakan sosial seperti *Black Lives Matter* di Amerika Serikat, *The Women Strike* di Polandia, dan protes terhadap Presiden Alexander Lukashenko di Belarus (Moskal dkk. 2022) tetap berjalan di tengah pandemi. Gerakan sosial ini beradaptasi dalam situasi pembatasan sosial dengan menggunakan media digital sebagai arena perjuangannya.

Selain itu, selama pandemi juga muncul gerakan sosial terhadap korupsi dan inefisiensi pemerintah dalam menangani krisis COVID-19 yang terjadi di beberapa negara seperti Argentina, dan Brazil (Abers, Rossi, dan von Bülow 2021). Gerakan sosial juga muncul untuk melawan misinformasi dan disinformasi (*infodemic*) COVID-19. Berbagai inisiatif seperti *#defyhatenow* - Sudan Selatan, *Dana Shubat* – Suriah, *Arayaa* – Benin, *Zimpapers TV Network* – Zimbabwe, *Japelidi*, *LaporCOVID-19*, dan *KawalCOVID19* di Indonesia muncul sebagai bentuk gerakan sosial baru untuk memerangi kekeliruan informasi di masa krisis (Lavenia 2021; Putri 2020).

KawalCOVID19 berupaya melawan *infodemic* dengan strategi konten informasi, edukasi, dan verifikasi tentang COVID-19 kepada masyarakat. Dibandingkan dengan riset sebelumnya terkait gerakan melawan *infodemic* terdapat gerakan kampanye komunitas *Japelidi* melawan COVID-19 dengan aktivis dari gerakan tersebut yang berasal dari akademisi dan pegiat literasi (Annisa, Adikara, dan Poerwaningtias 2020). Sementara itu, *KawalCOVID19* digerakkan oleh komunitas data yang fasih teknologi sehingga dapat menambah perspektif dari sisi komunitas diaspora dan pegiat data. Kemudian, praktik aktivisme data oleh relawan di Brazil yang mencoba mengatasi *infodemic* lewat kasus *Brasil.IO* (Füßy 2021). Negara Indonesia sebagai tempat aktivisme *KawalCOVID19* memiliki kondisi yang berbeda dari aspek data serta konteks politik dan sosial.

Hoaks COVID-19 adalah fenomena global, namun tidak dapat dipungkiri, Indonesia adalah negara dengan penyebaran hoaks COVID-19 yang tinggi. Dampaknya pun sangat mengganggu upaya penanganan pandemi (Hidayah dkk. 2021). Misinformasi dan disinformasi yang terjadi pada bidang kesehatan dapat membahayakan jiwa seperti yang terjadi dalam konteks *infodemic* saat pandemi COVID-19 yang menyulitkan penanganan pandemi dan pada titik tertentu membahayakan jiwa (Hidayah dkk. 2021).

Dalam kasus di Indonesia, kondisi *infodemic* berkembang karena berbagai faktor seperti ketidakpastian informasi dan komunikasi publik pemerintah yang belum memadai terutama di awal krisis sehingga ada gap informasi yang besar (Najib 2022; van Empel 2022). Oleh karena itu, upaya melawan *infodemic* atau misinformasi dan disinformasi COVID-19 memiliki tantangannya

tersendiri. Munculnya inisiatif *KawalCOVID19* dengan sistem urun daya juga menjadi bentuk aktivisme digital yang khas dalam merespons situasi yang terjadi di Indonesia.

Sementara itu, gerakan sosial yang mengkritisi kebijakan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah juga terjadi di beberapa negara seperti Argentina dan Brazil (Abers, Rossi, dan von Bülow 2021). Di Argentina, gerakan aktivis berfokus pada kebijakan jangka panjang atau pembangunan pasca pandemi karena sebagian aktivis dan pemerintah menyetujui aspek epidemiologis pandemi. Berbeda dengan kondisi tersebut, gerakan di Brazil fokus pada tanggap darurat jangka pendek dengan meluncurkan kampanye darurat untuk membangun kontra narasi terhadap penyangkalan pemerintah.

Di Indonesia, gerakan *KawalCOVID19* memiliki kondisi yang mirip dengan Brazil di mana pemerintah justru menyangkal adanya COVID-19. Respons kebijakan pemerintah juga justru dibenturkan dengan aspek ekonomi dan politik, misalnya pada awal Februari 2020 terdapat warga negara asal China yang terjangkit COVID-19 di Bali (CNN Indonesia 2020), pemerintah justru mengumumkan insentif *influencer* sebanyak Rp72 miliar untuk meningkatkan pariwisata (Hakim dan Rastika 2020). Padahal di negara lain, kebijakan *lockdown* mulai diberlakukan diantaranya di negara China, Italia, dan Spanyol (Aida dan Hardiyanto 2020). Kebijakan ini justru berbahaya karena memperparah penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu, *KawalCOVID19* mendorong dan mengkritisi tindakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 melalui upaya advokasi.

Dalam kondisi krisis, pemerintah sebagai otoritas memiliki kuasa atas informasi tetapi komunikasi dan kebijakan pemerintah tentang informasi COVID-19 justru tidak berdasarkan data, fakta, dan sains sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat. *KawalCOVID19* sebagai aktivisme digital berupaya melawan *infodemic* atau *counter-hoaxivism* dan hegemoni informasi pada masa pandemi COVID-19 melalui aktivisme data sebagai gerakan sosial baru. Aktivisme data *KawalCOVID19* tidak hanya untuk mengedukasi masyarakat saja tetapi juga bentuk kritik terhadap kebijakan dan komunikasi pemerintah yang bermasalah.

Penelitian aktivisme digital *KawalCOVID19* sebagai manifestasi dalam melawan *infodemic* pada saat pandemi COVID-19 dapat menjadi contoh empiris aktivisme data sebagai gerakan sosial baru. Namun, aktivisme data *KawalCOVID19* juga perlu dikritik dari sisi data untuk kasus COVID-19 yang bersumber dari pemerintah daerah dan pusat. Meskipun ada upaya untuk melakukan verifikasi dan analisis data, upaya konter data ini dapat lebih dieksplorasi dengan sumber data lain yang bukan dari pemerintah. Penelitian tentang *KawalCOVID19* ini juga memiliki limitasi karena berbicara konteks dan fenomena empiris yang ada di Indonesia saja.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa *KawalCOVID19* melawan *infodemic* dengan empat strategi. *Pertama*, pengumpulan, verifikasi, dan analisis data COVID-19 di daerah dan pusat. Hal ini dilakukan secara rutin setiap hari untuk menyajikan pembaruan tentang kasus COVID-19. *Kedua*, konten informasi, edukasi, dan verifikasi tentang COVID-19 agar masyarakat mengetahui dan memahami risiko virus COVID-19 serta siap dalam menghadapi pandemi COVID-19. *Ketiga*, diseminasi informasi di *website* dan media sosial kepada masyarakat dengan berbagai pendekatan sesuai audiens. Kemudian, advokasi kebijakan dengan sasaran pemerintah melalui medium diseminasi yaitu media digital dan media konvensional. *Keempat*, kolaborasi dengan mitra untuk memperluas jangkauan pesan.

KawalCOVID19 juga menghadapi tantangan dari sisi hambatan teknologi yaitu limitasi dari jangkauan *website* dan media sosial; hambatan interaksional yaitu serangan pendengung (*buzzer*) politik dan literasi masyarakat yang masih rendah; hambatan personal yaitu kondisi psikologis relawan dan manajemen relawan; dan hambatan kebijakan yaitu transparansi data serta komunikasi dan kebijakan pemerintah yang belum memadai.

Bentuk aktivisme *KawalCOVID19* dikategorikan sebagai *digital gladiatorial activities* dengan bentuk *data activism*. Kategori ini ditandai dengan keterlibatan aktor yang sedikit, memiliki keahlian dan berdampak besar. Aktivisme data *KawalCOVID19* termasuk dalam *proactive data activism* karena terdapat upaya advokasi berbasis data untuk perubahan dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari perspektif Gerakan Sosial Baru, aktivisme data *KawalCOVID19* dapat ditelaah dari empat aspek yaitu ideologi dan tujuan, taktik, struktur, dan partisipan. Untuk ideologi yaitu transparansi informasi dan tujuan melawan gangguan informasi serta mendorong perbaikan kebijakan dari pemerintah. Taktik *KawalCOVID19* adalah informasi, edukasi, verifikasi, dan advokasi. *KawalCOVID19* memiliki struktur yang fleksibel dan partisipan yang fokus pada isu sosial tentang pandemi COVID-19.

Hasil penelitian juga menemukan hal yang perlu dikritik dari aktivisme digital *KawalCOVID19* yaitu sumber data kasus COVID-19 berasal dari pemerintah yang justru bermasalah dan tidak konsisten. Meskipun demikian, terdapat upaya untuk melakukan verifikasi dan analisis data COVID-19 dari pemerintah, upaya konter data ini dapat lebih dieksplorasi dengan sumber data lain.

Sebagai sebuah gerakan sosial baru, *KawalCOVID19* menjadi fenomena empiris dalam bentuk aktivisme digital dengan aktivitas aktivisme data. Data atau informasi dari *KawalCOVID19* relatif objektif dan akurat karena proses pengumpulannya yang cukup dijelaskan dan sumber yang resmi. Meskipun masih ada tantangan dari sumber data pemerintah. Namun, *KawalCOVID19* menjadi contoh keterlibatan warga secara kolektif dalam upaya menangani permasalahan pandemi COVID-19 dilakukan dengan ikut terlibat aktif di ruang demokrasi dengan memanfaatkan teknologi. Aktivisme digital *KawalCOVID19* dapat menjadi pelajaran untuk konteks krisis kesehatan lain sebagai salah satu model yang dapat ditawarkan untuk melawan gangguan informasi.

Aktivisme digital sebagai manifestasi untuk melawan *infodemic* muncul karena ketidakpastian informasi pada masa pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa aktivisme digital menjadi proses yang dinamis. Aktivisme digital juga dapat dilihat dari fenomena empiris dengan konteks sosial, budaya, dan politik tertentu.

Untuk saat ini, aktivisme digital dalam melawan hoaks terus berkembang yang masih membuka peluang kajian secara teori dan empiris dengan konteks yang berbeda dan aktor aktivisme atau komunitas yang berbeda serta analisis resepsi terhadap aktivisme yang dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini ditulis oleh Agne Yasa sebagai Kontributor Utama dan Rahayu sebagai Kontributor Anggota dari Departemen Ilmu Komunikasi berdasarkan hasil penelitian *Aktivisme Digital dalam Melawan Infodemic pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia* yang dibiayai oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM melalui Program Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2022. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abers, Rebecca Neaera, Federico M. Rossi, dan Marisa von Bülow. 2021. "State–society relations in uncertain times: Social movement strategies, ideational contestation and the pandemic in Brazil and Argentina." *International Political Science Review* 42 (3): 333–49. <https://doi.org/10.1177/0192512121993713>.
- Aida, Nur Rohmi, dan Sari Hardiyanto. 2020. "Update, Berikut 15 Negara yang Berlakukan Lockdown akibat Virus Corona Halaman all - Kompas.com." *kompas.com*. 22 Maret 2020. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/22/183000465/update-berikut-15-negara-yang-berlakukan-lockdown-akibat-virus-corona?page=all>.
- Annisa, Firly, Gilang Jiwana Adikara, dan Intania Poerwaningtias. 2020. "Kampanye Daring Japelidi dalam Bingkai Budaya Partisipasi." Dalam *Kolaborasi Lawan (HOAKS) Covid-19: Kampanye, Riset dan Pengalaman di Tengah Pandemi*, disunting oleh Novi Kurnia, Lestari Nurhajati, dan Santi Indra Astuti, 55–77. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.
- Baack, Stefan. 2015. "Datafication and empowerment: How the open data movement re-articulates notions of democracy, participation, and journalism." *Big Data & Society* 2 (2). <https://doi.org/10.1177/2053951715594634>.
- BBC News Indonesia. 2021. "Angka kematian Covid-19: Beda data pemerintah pusat dan daerah capai 19.000 kasus, 'hijau di luar merah di dalam.'" *bbc.com*. 28 Juli 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57971840>.
- Buechler, Steven M. 1995. "New Social Movement Theories." *The Sociological Quarterly, Summer* 36 (3): 441–64. <https://www.jstor.org/stable/4120774>.
- CNN Indonesia. 2020. "Kemenkes Duga WN China di Bali Terjangkit Corona di Shanghai." *cnnindonesia.com*. 13 Februari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200213170654-20-474368/kemenkes-duga-wn-china-di-bali-terjangkit-corona-di-shanghai>.
- Covid19.go.id. 2020. "Pemerintah Pusat Dan Daerah Intensifkan Sinkronisasi Data Covid-19 - Berita Terkini | Covid19.go.id." 2 Desember 2020. <https://covid19.go.id/id/p/berita/pemerintah-pusat-dan-daerah-intensifkan-sinkronisasi-data-covid-19>.
- . 2021. "Data Vaksinasi COVID-19 (Update per 31 Desember 2021)." 31 Desember 2021. <https://covid19.go.id/id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-31-desember-2021>.
- detikcom. 2020. "Menkes Budi Gunadi Terima Relawan Corona, dr Tirta: Ini Sejarah!" 24 Desember 2020. <https://news.detik.com/berita/d-5308261/menkes-budi-gunadi-terima-relawan-corona-dr-tirta-ini-sejarah>.
- Dumitrica, Delia, dan Mylynn Felt. 2020. "Mediated grassroots collective action: negotiating barriers of digital activism." *Information Communication and Society* 23 (13): 1821–37. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1618891>.
- Eysenbach, Gunther. 2020. "How to fight an infodemic: The four pillars of infodemic management." *Journal of Medical Internet Research* 22 (6). <https://doi.org/10.2196/21820>.
- Farisa, Fitria Chusna, dan Bayu Galih. 2020. "LP3ES Catat Ada 37 Pernyataan Blunder Pemerintah soal Covid-19." *Kompas.com*. 6 April 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/06/17522121/lp3es-catat-ada-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-covid-19?page=all>.
- Farizi, Sofia al, dan Bagus Nuari Harmawan. 2020. "Data Transparency and Information Sharing: Coronavirus Prevention Problems in Indonesia." *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia* 8 (2): 35. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.35-50>.
- Füssy, Peter. 2021. "Liberating COVID-19 Data with Volunteers in Brazil." Dalam *COVID-19 from the Margins: Pandemic Invisibilities, policies and Resistance in the Datafied Society*, disunting oleh Stefania Milan, Emiliano Trere, dan Silvia Masiero, 241–45. Amsterdam: Institute of Network Cultures. <https://pure.uva.nl/ws/files/55600197/Covid19FromTheMargins.pdf>.

- George, Jordana J., dan Dorothy E. Leidner. 2019. "From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism." *Information and Organization* 29 (3). <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001>.
- Grimley, Naomi, Jack Cornish, dan Nassos Stylianou. 2022. "Covid: Jumlah kematian tak langsung, Indonesia tertinggi ketiga, di bawah India dan Rusia, menurut WHO - BBC News Indonesia." BBC News Indonesia. 6 Mei 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61338083>.
- Hakim, Rakhmat Nur, dan Icha Rastika. 2020. "Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata." *kompas.com*. 25 Februari 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/25/20380521/pemerintah-anggarkan-rp-72-miliar-untuk-bayar-influencer-demi-tingkatkan>.
- Heychael, Muhamad, Yovantra Arief, dan Muhammad Fajar. 2021. "Ekosistem Informasi Di Jakarta: Studi Ketimpangan Pasokan dan Permintaan Informasi Selama Pandemi Remotivi." <https://remotivi.or.id/penelitian/13/ekosistem-informasi-di-jakarta-studi-ketimpangan-pasokan-dan-permintaan-informasi-selama-pandemi>.
- Hidayah, Nuril, Cahya Suryani, Priska Nur Safitri, Santi Indra Astuti, Anita Ashivini Wahid, Puradian Wiryadigda, dan Krisna Danuaji. 2021. "Laporan Pemetaan Hoaks COVID-19 Tahun 2020 – MAFINDO." <https://www.mafindo.or.id/blog/2021/10/18/laporan-pemetaan-hoaks-covid-19-tahun-2020/>.
- KawalCOVID19. 2021. "KawalCOVID19 di Twitter: 'Tuips - 20 bulan sejak pandemi, kini situasi Indonesia membaik & mulai terkendali, maka update data kasus harian & vaksinasi kami hentikan. Akun ini tetap ada - apabila ada info tentang covid atau sekadar RT berita relevan / signifikan. <https://t.co/LSJtpk4aRg>' / Twitter." Twitter. 3 November 2021. <https://twitter.com/KawalCOVID19/status/1455897624880431112>.
- KawalCOVID19.id. 2020. "KawalCOVID19 untuk mengurai derasnya informasi seputar COVID-19." *kawalCOVID19.id*. 2020. <https://kawalCOVID19.id/tentang-kami>.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2020. "Pemerintah RI Nyatakan Komitmen Tangani Infodemic." *www.kominfo.go.id*. 23 September 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/29609/siaran-pers-no-116hmkominfo092020-tentang-pemerintah-ri-nyatakan-komitmen-tangani-infodemic/0/siaran_pers.
- Lavenia, Anastasya. 2021. "Media Warga di Kala Wabah: Bukti Kegagalan Pemerintah." *Remotivi*. 14 Juli 2021. <https://www.remotivi.or.id/headline/konsep-dan-isu/694>.
- Lee, Antony. 2018. "'GUARDING THE ELECTIONS ONLINE': New Practices, Trust, and Empowerment of Citizens Identities 1." *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities* 8 (1): 11–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jissh.v8i1.89>.
- Milan, Stefania. 2017. "Data Activism as the New Frontier of Media Activism." Dalam *Media Activism in the Digital Age: Charting an Evolving Field of Research*, disunting oleh Goubin Yang dan Viktor Pickard, 2017 ed. Routledge. <https://ssrn.com/abstract=2882030>.
- Milan, Stefania, dan Lonneke van der Velden. 2016. "The alternative epistemologies of data activism." <http://ssrn.com/abstract=2850470>.
- Monggilo, Zainuddin Muda Z. 2020a. "Komunikasi publik pemerintah masa COVID-19: Telaah kritis sistem informasi publik." Dalam *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*, disunting oleh Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. Gadjah Mada University Press.
- . 2020b. "Sistem informasi publik COVID-19: Telaah konten chatbot dalam melawan gangguan informasi masa pandemi." Dalam *Kolaborasi lawan (hoaks) COVID-19: Kampanye, Riset, dan Pengalaman Japeli di Tengah Pandemi*, disunting oleh Novi Kurnia, Lestari Nurhajati, dan Santi Indra Astuti, 331–51. Program Studi Magister Ilmu Komunikasi UGM.
- Moskal, Anna, Maciej Andruszko, Andrzej Cieplý, Sabina Długosz, dan Krystian Petz. 2022. *Social Movements in a Time of the COVID-19 Pandemic*. <https://www.researchgate.net/publication/361309108>.

- Paskarina, Caroline. 2020. "Digital Activism and Democracy in Indonesia Learning from the Foregoing Research Issues (2014-2020)." *Indonesian Journal of Political Research (IJPR)* 1 (Desember): 2747–2590.
- Pichardo, Nelson A. 1997. "New Social Movements: A Critical Review." *Source: Annual Review of Sociology*. Vol. 23.
- Putri, Ann. 2020. "Tentang Mereka yang Melawan Covid-19 dengan Informasi." *Remotivi*. 11 Mei 2020. <https://dev.remotivi.or.id/headline/konsep-dan-isu/591>.
- Treré, Emiliano, dan Anne Kaun. 2021. "Digital Media Activism." <https://doi.org/10.1515/9783110740202-019>.
- Wardle, Claire. 2019. *Understanding Information Disorder*. First Draft.
- Wardle, Claire, dan Hossein Derakhshan. 2017. "INFORMATION DISORDER: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making Information Disorder Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking." www.coe.int.
- . 2018. "Thinking about 'information disorder': formats of misinformation, disinformation, and mal-information." Dalam *Journalism, "Fake News" & Disinformation*, disunting oleh Cherilyn Ireton dan Posetti Julie. UNESCO.
- WargaBantuWarga. 2021. "Informasi Faskes & Alkes untuk COVID-19 | Warga Bantu Warga." wargabantuwarga.com. 2021. <https://www.wargabantuwarga.com/>.
- Winanti, Poppy S, dan Wawan Mas'udi. 2020. "Policy Brief Edisi 3 Problem Infodemic dalam Merespons Pandemi COVID-19." <https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy-Brief-Problem-Infodemic-dalam-Merespon-Pandemi-COVID-19.pdf>.
- World Health Organization. 2021. "Infodemic management: an overview of infodemic management during COVID-19, January 2020-May 2021." <https://www.who.int/publications/i/item/9789240035966>.
- World Health Organization Regional Office for South-East Asia. 2020. "Communicating and Managing Uncertainty in the COVID-19 Pandemic: A quick guide." <https://www.who.int/docs/default-source/searo/whe/coronavirus19/managing-uncertainty-in-covid-19-a-quick-guide.pdf>.
- Youngs, Richard, Marisa von Bülow, Cristina Buzasu, Youssef Cherif, Hafsa Halawa, Ming-sho Ho, Maureen Kademaunga, dkk. 2021. "Civil Society and the Global Pandemic: Building Back Different? Carnegie Civic Research Network." https://carnegieendowment.org/files/2021-CRN_Global%20Pandemic.pdf.
- Zarocostas, John. 2020. "How to fight an infodemic." *Lancet (London, England)* 395 (10225): 676. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30461-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30461-X).